

**COLLABORATIVE DIGITAL TRANSFORMATION  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT****Rio Yusri Maulana<sup>1\*</sup>**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Jambi. Indonesia\***Korespondensi:** rioyusrimaulana@unja.ac.id**ABSTRACT**

*This article is intended to contribute as an additional new reference for academics and practitioners in the field of government science and to introduce the concept of developing digital government transformation that focuses on collaboration in Indonesian local governments. This article uses case studies and a limited literature review to explore how collaboration can play an important role in the implementation of digital transformation in the West Java Digital Service (JDS), under the West Java Provincial Communication and Information Office. As a digital-based local government agency, Indonesia has the goal of being an accelerator of achieving government targets to break the digital divide for remote communities, improve the efficiency and accuracy of data and technology-based community data policies, support services and community policy making that are responsive, adaptive, and innovative. This article provides an overview of how Indonesian local governments deliver digital-based policies through joint decision-making or collaborative governance, seeking to share decision-making power with stakeholders to develop joint recommendations for effective and lasting solutions to public problems.*

**Keywords:** Digital Government, Pentahelix Collaboration, Local Government, Public Policy

**ABSTRAK**

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi baru bagi akademisi dan praktisi di bidang ilmu pemerintahan dan untuk mengenalkan konsep pengembangan transformasi pemerintahan digital (Digital Government Transformation) yang fokus pada kolaborasi di pemerintah daerah Indonesia. Artikel ini menggunakan studi kasus dan tinjauan pustaka terbatas untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi dapat memainkan peran penting dalam implementasi transformasi digital di Jabar Digital Service (JDS), atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat merupakan instansi pemerintah daerah yang berbasis digital, Indonesia memiliki tujuan sebagai akselerator pencapaian target pemerintah untuk mendobrak kesenjangan digital bagi masyarakat terpencil, meningkatkan efisiensi dan akurasi kebijakan data masyarakat berbasis data dan teknologi, mendukung pelayanan dan pengambilan kebijakan masyarakat yang responsif, adaptif, dan inovatif. Artikel ini memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah Indonesia menyampaikan kebijakan berbasis digital melalui pengambilan keputusan bersama atau tata kelola kolaboratif, yang berupaya berbagi kekuatan dalam pengambilan keputusan dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan rekomendasi bersama untuk solusi yang efektif dan langgeng bagi masalah publik.

**Kata Kunci:** Pemerintah Digital, Kolaborasi Pentahelix, Pemerintah Lokal, Kebijakan Publik

## PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor publik berarti cara baru untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait sektor digital publik, membangun kerangka kerja baru dalam pemberian layanan, dan menciptakan bentuk hubungan baru (Misuraca et al., 2020). Transformasi digital yang berhasil akan memungkinkan sektor publik untuk beroperasi secara efisien dan efektif di lingkungan digital, dan untuk memberikan layanan publik yang lebih sederhana dan kebijakan yang lebih efektif (Greenway et al., 2021).

Namun, mewujudkan sepenuhnya transformasi digital ini membutuhkan perubahan paradigma dari *e-government* ke digital government (OECD, 2014). Pendekatan pemerintah digital mendukung penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di berbagai tahap siklus hidup kebijakan publik dan pada layanan, berdasarkan Pemerintah sebagai platform dan lingkungan kebijakan yang digerakkan pengguna untuk peningkatan efisiensi dan pengembangan layanan yang disesuaikan berdasarkan kepemilikan bersama dan tanggung jawab bersama dengan

masyarakat sipil (OECD, 2020). Selain itu, melibatkan warga secara aktif melalui kolaborasi dalam desain dan implementasi kebijakan dan layanan semakin meningkatkan legitimasi dan efektivitas mereka, dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap pemerintah.

Bagi pemerintah daerah di Indonesia, sebuah konsep transformasi pemerintahan digital muncul sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan populasi dan wilayahnya. Dalam artikel ini, penulis akan fokus pada salah satu pemerintah daerah terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 49 juta jiwa atau setara dengan 20 persen dari total penduduk di Indonesia. Hamparan wilayah dengan luas 3,7 juta hektar juga merupakan salah satu yang terluas di Indonesia, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 5.312 desa, dan 645 kecamatan. (Pemprov Jabar, 2022).

Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Barat mengalami pertumbuhan penduduk yang paling pesat dari zaman ke zaman. Sejalan dengan kualitas sumber daya manusia yang telah mendorong pembangunan sosial ekonomi, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu

provinsi yang paling produktif dan berdaya saing ekonomi di dunia. Namun seperti pemerintah daerah besar lainnya di Indonesia, Jawa Barat harus menghadapi banyak tantangan di era digital saat ini. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah daerah terutama dalam menghadirkan kebijakan publik dan layanan publik pada bidang pendidikan, transportasi umum, dan layanan kesehatan dengan akses yang sama bagi semua orang.

Untuk mempercepat transformasi digital di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginisiasi lahirnya *Jabar Digital Service* (JDS) sebagai lembaga pemerintah berbasis inovasi teknologi informasi untuk membantu efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pengambilan kebijakan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengembangan inovasi dan pelayanan publik yang responsif. Jabar Digital Service (JDS), atau Pusat Layanan Informasi Digital, Data, dan Geospasial Provinsi Jawa Barat, bercita-cita untuk mewujudkan visi Pemerintah Jawa Barat sebagai provinsi digital yang berbasis data dan teknologi, mendukung pelayanan masyarakat dan pembuatan kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif. (Layanan Digital Jabar, 2021).

Unit ini berada diluar struktur diskominfo tetapi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, JDS memiliki misi untuk mewujudkan pengambilan kebijakan berbasis data, mempercepat transformasi digital pemerintah, dan menyederhanakan kehidupan masyarakat dengan teknologi digital. Sebagai salah satu instansi yang membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun Provinsi Jawa Barat berdasarkan data, aspirasi atau pengaduan yang merupakan bentuk umpan balik, dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik atau meningkatkan infrastruktur pelayanan publik. Salah satu visi Gubernur Ridwan Kamil dalam pemerintahannya adalah menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi digital. JDS sebagai bentuk solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan digital antara desa dan kota, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan kebijakan berbasis data dan teknologi untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi digital berbasis data dan teknologi, dalam mendukung layanan dan pengambilan keputusan. kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan inovatif.

Proses kolaboratif menurut Ansell & Gash (2008) merupakan rangkaian komponen yang berjalan membentuk suatu

siklus, saling mempengaruhi, dan pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan bersama diantaranya sebagai berikut: 1) Dialog antar muka (*face to face dialogue*); 2) Membangun kepercayaan (*trust building*); 3) Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*); 4) Pemahaman bersama (*shared understanding*); 5) *Emporary impact* (*intermediate outcomes*).

Untuk mempercepat transformasi digital ini, Pemerintah Jawa Barat melakukan pendekatan kolaboratif dengan konsep pentahelix. Kolaborasi pentahelix merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan lima pelaku pembangunan, yaitu akademisi, bisnis (sektor swasta), komunitas, pemerintah (sektor publik), dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau media (Viken, 2021).

Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih aktor untuk bergabung dalam gugus tugas di pentahelix adalah: a) aktor yang mampu dan mau berpartisipasi dalam seluruh proses perencanaan, mulai dari penyusunan rencana untuk pelaksanaan tindakan; b) aktor yang berkontribusi secara konstruktif pada proses; c) aktor yang memiliki

jaringan di sektor terkait; dan d) aktor yang dapat mewakili lebih banyak pemangku kepentingan daripada pentahelix. Karena itu, pada prinsipnya, tidak semua pihak di lingkungan pemerintahan bisa bergabung dengan tim pentahelix. Menafsirkan konsep ini, ada aktor yang berperan dalam perkembangan transformasi digital di Jawa Barat yang dikenal dengan ABCGM (akademisi-bisnis-komunitas-pemerintah-Media).

## METODE

Dalam artikel ini menggunakan metodologi studi kasus untuk memahami mengapa dan bagaimana fenomena sosial yang menarik terjadi melalui data. Metodologi studi kasus merupakan pendekatan yang tepat untuk melakukan penelitian eksploratif ini (Yin, 2017). Kajian ini juga bersifat induktif sehingga dapat berkontribusi dalam membangun pemahaman baru. Studi kasus di pemerintah daerah jarang terjadi, dan seringkali cenderung hanya mencakup isu-isu praktis tertentu dalam kebijakan pemerintahan. Hal-hal praktis seperti itu dapat mengatasi berbagai masalah: mulai dari menangani masalah yang terkait dengan reformasi dan restrukturisasi manajemen TIK di lingkungan pemerintah daerah (Nam & Pardo, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Obyektif Transformasi Digital di Indonesia Secara Umum.

Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan sedang bertransformasi dari negara berkembang berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara dengan ekonomi yang inklusif, modern, dan dihormati dan disegani di panggung internasional. Salah satu faktor atau indikator pertumbuhannya adalah pesatnya industrialisasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dari USD 0,5 triliun pada 2009 menjadi USD 1,1 triliun pada 2019. Namun, kondisi ini tidak sejalan dengan tingkat perkembangan inovasi yang mengiringi pertumbuhan PDB. Terlihat pada Global Innovation Index (GII) 2019 nilai GII Indonesia berada di bawah Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Peringkat Indonesia pada tahun 2019 adalah 85, atau posisi terendah kedua dibandingkan negara lain di ASEAN (Katadata.co.id, 2019)

Lima langkah untuk percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi landasan

bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital. Digital Indonesia telah menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Keenam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kemampuan teknologi kelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat dengan budaya digital yang siap menghadapi masa depan. Selain itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 mengamanatkan beberapa fokus belanja untuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Rp 30,5 triliun pada tahun 2021 untuk pengembangan TIK, yang difokuskan pada beberapa aspek (Setkab, 2020): 1) Percepatan transformasi digital bagi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah; 2) Mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; 3) Konsolidasi dan optimalisasi infrastruktur, terutama yang digunakan dengan kelembagaan lintas sektor; 4) Mewujudkan inklusi masyarakat dalam mengembangkan wilayah prioritas dan mendorong pemerataan dengan tambahan akses internet di 4000 desa dan kelurahan.

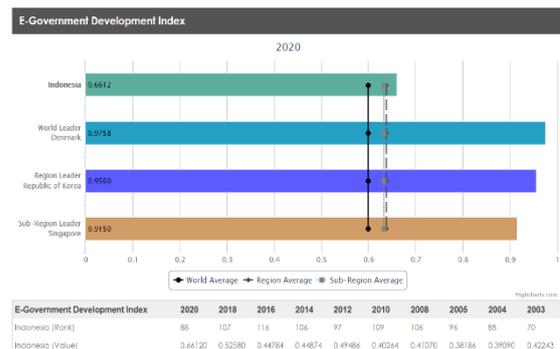
Dalam perkembangan terakhir, terdapat beberapa poin positif yang dapat menjadi titik balik transformasi digital di Indonesia. Dia terlihat dari kerjasama di tingkat pembuatan kebijakan, dukungan fiskal dan infrastruktur. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia Berbasis Elektronik (SPBE) melibatkan instansi pemerintah lintas sektor; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Siber Nasional dan Badan Sandi Negara (BSSN).

Kolaborasi dalam pemerintahan berimplikasi bahwa semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab yang sama atas keputusan yang diambil, oleh karena itu kolaborasi mengharuskan pihak-pihak yang terlibat harus duduk satu meja dan memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan (Maulana, 2020).

United Nations (UN) e-Government Survey 2020, dengan tema *Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*, memprediksi negara-negara yang mendapatkan lebih dari

0,75 poin sebagai EGDI sangat tinggi, 0,50 hingga 0,75 sebagai EGDI Tinggi, 0,25 hingga 0,75 poin . 0,50 sebagai EGDI peringkat menengah, dan kurang dari 0,25 sebagai EGDI Rendah. Dalam survei ini, Indonesia menempati peringkat ke-88 dalam pengembangan dan implementasi e-government atau SPBE. Indonesia naik 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di peringkat 107 , dan peringkat 116 pada 2016. (PBB, 2020). Secara keseluruhan, Indonesia mendapat skor 0,6612 dalam kelompok *High e-Government Development Index* (EGDI) dalam UN e-Government Survey 2020, hasil yang menempatkan Indonesia kembali pada peringkat 100 besar dunia pada posisi 88 dari 193 negara.

**Gambar I:**  
**Survei e-Government PBB 2020**



### **Sumber: PBB 2020**

Tantangan transformasi digital di Indonesia saat ini adalah infrastruktur yang belum merata, mengingat kondisi infrastruktur TIK Indonesia masih belum merata di seluruh Indonesia. Hal ini

ditunjukkan dengan masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau layanan sinyal 4G, 9.113 desa/kelurahan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), dan 3.435 desa/ kelurahan di daerah non-3T. Akses internet di Indonesia juga masih cukup rendah. Berdasarkan data Speedtest Global Index 2020, kecepatan akses internet Indonesia berada di peringkat 120 dunia, sedangkan untuk kecepatan fixed broadband, Indonesia berada di peringkat 115 dunia. (indonesia.go.id, 2022).

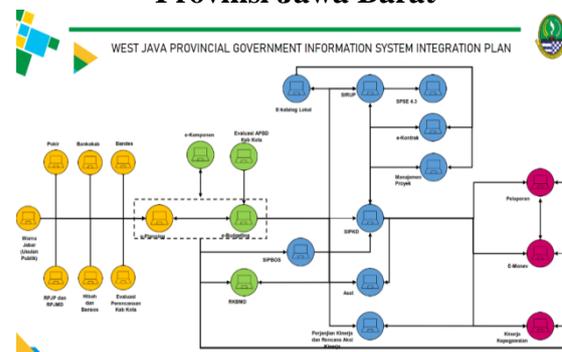
Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang *e-Government* ditujukan untuk optimalisasi pemerintahan digital di Indonesia, namun masih belum optimal. bahkan jauh dari yang diharapkan oleh regulasi, meski tidak bisa dipungkiri ada beberapa daerah yang menunjukkan kinerja yang baik dalam mengembangkan digital government.

### **Pendekatan Kolaboratif Pentahelix di Provinsi Jawa Barat.**

Melalui konsep *digital government*, Pemprov Jabar bermaksud agar pemerintah datang ke masyarakat-bukan sebaliknya. Opsi ini diwujudkan dengan cara

pemerintah provinsi mengagandeng pihak ketiga agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik secara online dan baik (jabarprov.go.id, 2019a). Percepatan transformasi digital di Jawa Barat sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2023. Penjabaran visi dan misi pada RPJMD dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi, Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dengan terminologi “Inovasi” artinya pembangunan yang dilakukan di berbagai sektor dan daerah didukung oleh inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “kolaborasi” adalah perwujudan visi dilakukan dengan kerjasama antar tingkat pemerintahan, antar daerah dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

**Gambar II:**  
**Rencana Integrasi IS Pemerintah Provinsi Jawa Barat**



*Sumber: Website jabarprov.go.id, 2019*

Dokumen RPJMD memperkenalkan pendekatan baru dalam pembangunan di Jawa Barat, salah satunya adalah pendekatan kolaboratif Pentahelix, merupakan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pembangunan yang lebih dikenal dengan ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media). Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau metode yang telah dilakukan selama ini, tetapi juga harus disertai dengan berbagai bentuk reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian pula diharapkan terjalin kerjasama yang intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat serta dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta, LSM, media, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah signifikan untuk menyelaraskan pemerintahan digital dengan proses kolaborasi, strategi dalam pelibatan publik, penyediaan kebijakan dan penyampaian publik. Menurut Denis Anderson, et al (Anderson et al., 2015) , upaya pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik secara adil, efektif, inklusif berpusat pada warga negara, dan sektor publik yang memiliki kapasitas untuk menyediakan pelayanan, perlu

diperkuat di tingkat pusat dan daerah. Artinya, diperlukan upaya untuk memperkuat empat dimensi utama di sektor publik: 1) lembaga publik - terutama di tingkat daerah, untuk memberikan pelayanan; 2) kapasitas kepemimpinan dan sumber daya manusia - diperlukan untuk memberikan layanan secara transparan, adil, efisien dan akuntabel; 3) proses dan mekanisme - yang mendukung partisipasi warga dalam desain dan penyampaian layanan; dan 4) budaya organisasi - untuk menciptakan ruang bagi perbaikan dan inovasi berkelanjutan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Pencapaian indikator dalam misi kelima RPJMD Jabar terkait kerjasama ditunjukkan oleh 2 (dua) indikator kinerja daerah, yaitu indeks reformasi birokrasi dan tingkat efektivitas kerjasama daerah. Pencapaian indeks reformasi birokrasi tercatat dalam kategori BB pada tahun 2019. Indeks ini dapat diartikan bahwa hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB merupakan hasil yang signifikan terhadap reformasi birokrasi di Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun capaian efektivitas kerja sama regional tercatat sebesar 71,33 persen dari target 54 persen. Kondisi ini dapat diartikan bahwa kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti hingga hasil kerjasama dapat direalisasikan

dan menunjukkan peningkatan yang positif. Alhasil, menurut survei persepsi Maladministrasi 2018, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua setelah NTT dalam hal kualitas pelayanan publik. Ini jauh lebih baik dari Sumatera Utara, Jakarta, Jambi, dan lima provinsi lain yang disurvei. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini mampu menjalankan pemerintahan 3.0 berdasarkan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Model ini jauh lebih maju daripada model pemerintahan berbasis kinerja dan model pemerintahan yang berbasis aturan. (Jabarprov.go.id, 2019a).

Dari penjelasan di atas, upaya kolaboratif telah dilembagakan ke dalam sistem perencanaan pembangunan, terutama memaksimalkan peran multi-stakeholder dalam membantu pemerintah mencapai tujuannya. Dari sisi pemerintahan, tentunya percepatan upaya transformasi digital di pemerintahan ini tidak lepas dari keinginan untuk menciptakan organisasi yang mampu mengelola kolaborasi, sejalan dengan salah satu tujuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. dalam pemerintahannya, adalah mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital.

Kekhawatiran ini bermula dari tingginya disparitas antara pedesaan dan perkotaan dalam hal teknologi. Minimnya infrastruktur pendukung di pedesaan membuat warga desa sulit menikmati manfaat yang ditawarkan teknologi digital. Hal inilah yang melahirkan ide pembentukan *West Java Digital Service (JDS)* atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Informasi Digital, Data, dan Geospasial yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang dicita-citakan. untuk dapat mempersempit kesenjangan digital, membantu efisiensi dan akurasi. pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi, serta merevolusi penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Jawa Barat.

Visi JDS adalah mewujudkan Jawa Barat berbasis data dan teknologi untuk mendukung layanan masyarakat dan pembuatan kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif. JDS memiliki 3 visi yaitu: 1) Data untuk Pendukung Keputusan-Sistem Mewujudkan pembuatan kebijakan berbasis data. 2) Transformasi Digital Pemerintah-Mempercepat transformasi digital pemerintahan. 3) Meningkatkan Citizens Digital Experience-Mempermudah kehidupan masyarakat dengan teknologi digital. Lihat Gambar dibawah:

## Gambar II: Kerjasama Pentahelix dalam Program Kampung Digital Jawa Barat



**Sumber:** Layanan Digital Jabar 2021

Hal inilah yang dilakukan Pemprov Jabar dengan JDS. Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa inovasi, antara lain penerapan konsep Pentahelix dan implementasi program Kampung Digital ([jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id), 2019b). Dalam rangka pemerataan pembangunan desa, pemerintah Jawa Barat mengoptimalkan program Desa Digital dengan pendekatan pentahelix. Pada tahun 2021, program ini hadir dengan tema baru yang sejalan dengan agenda The 2021 *United Nations Climate Change Conference* (COP26), yaitu pengelolaan sampah terpadu (*waste management*) dan produksi kemasan ramah lingkungan (*biodegradable*) mengiringi inisiatif lain dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan dan

multimedia. Tercatat 1904 desa menjadi penerima program Desa Digital.

Pelaksanaan program Desa Digital merupakan upaya dan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat dengan memaksimalkan potensi desa melalui kerjasama dengan berbagai mitra. Pada tahun 2021, Desa Digital akan terus mengupayakan pengadaan infrastruktur digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Tercatat hingga Maret 2021 telah terpasang 353 VSAT (*Very Small Aperture Terminals*) dan telah dilakukan replikasi desa wi-fi digital. Tak hanya itu, dengan akses digital, pembekalan literasi digital melalui pendampingan dengan mitra dan masyarakat juga ditingkatkan. 141 desa telah menerima pelatihan literasi digital. Webinar literasi digital dengan konsep *Training of Trainers* (ToT) juga digelar untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan informasi hoax, melalui perwakilan kader dari masing-masing daerah. Pemanfaatan potensi desa melalui ekonomi digital juga telah dilaksanakan di beberapa titik desa di Jawa Barat.

Pemerintah Jawa Barat bekerja sama dengan Tokopedia dan Shopee meluncurkan Village Digital Center (Talesa), kini 35 desa

telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung potensi pengembangan ekonomi desanya. Dari 24 desa yang menjadi target pemekaran Desa Digital, ternyata tahun ini kita sudah berkali-kali berhasil mengimplementasikan desa digital tematik. Pencapaian ini telah menjadikan kemandirian desa melalui inovasi digital yang diterapkan di total 460 desa di Jawa Barat.

**Gambar IV:**  
**Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya percepatan transformasi digital**



**Sumber:** Jabar Digital Service 2021

Selain berbagai capaian yang telah diperoleh dari penjelasan-penjelasan di atas, ada beberapa hambatan dan tantangan implementasi transformasi digital di Provinsi Jawa Barat diantaranya sebagai berikut: 1) Belum adanya pengaturan standarisasi yang jelas mengenai implementasi pemerintahan digital dan transformasi digital dalam payung aturan yang lebih luas serta kurangnya sosialisasi

tentang bagaimana implementasi digital government ini secara nyata dan ideal untuk kolaborasi di pemerintah daerah, yang terkait dengan keberlanjutan inovasi kebijakan; 2) Belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola proses bisnis pemerintahan digital pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkenaan dengan tugas-tugas umum pemerintahan diluar dari JDS, yang menyebabkan kesenjangan antara birokrasi internal pemerintah; 3) Jaringan infrastruktur teknologi dan akses terhadap dan informasi belum merata ke daerah kabupaten/kota dilingkup Provinsi Jawa Barat; 4) Kurangnya pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan literasi digital terkait pemanfaatan TIK pada daerah-daerah non kota, terutama pada wilayah pedesaan; 5) Kurangnya komitmen dari pembuat kebijakan tingkat atas di pemerintah daerah pada level lebih rendah untuk mendukung implementasi *digital government*, yang menghambat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk warga, dan sektor privat; 6) Masih terdapat budaya organisasi yang kurang mendukung perubahan, dan budaya berbagi ilmu dan informasi yang rendah terutama antar instansi pemerintah, hal ini memang membutuhkan proses, akan tetapi potensi-

potensi disupsi dari internal ini akan menghambat percepatan transformasi digital

### SIMPULAN

Hadirnya Jabar Digital Services (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat, merupakan bentuk nyata dari upaya transformasi digital di pemerintahan daerah. Dilihat dari pendekatan kolaborasi pentaheliks, adaptasi pelaksanaan kebijakan digital menjadi lebih terpola, terpadu dan berasal dari satu sumber yang jelas. Keterpaduan ini sangat membantu pengambil kebijakan, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat untuk memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan publik ataupun kebijakan yang bersifat sporadis seperti pandemi covid-19.

Kesenjangan digital masih menjadi tugas rumah yang cukup besar bagi pemerintah daerah di Indonesia, bukan hanya dari aspek dukung seperti infrastruktur, akan tetapi adaptasi percepatan literasi digital untuk publik sangat diperlukan. Catatan penting dari artikel ini adalah perlunya penegasan regulasi yang memadai pada level pemerintah pusat berupa penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). dan pada level daerah, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur lingkup dan sasaran yang menjadi tugas dari masing-masing unit organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi berkenaan dengan Digital Government yang juga menjadi payung dari program-program transformasi digital yang berbasis pada aspek ketersediaan akses bagi semua kalangan (inklusif), keterpaduan pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan keberlangsungan terhadap sistem yang dibangun, menjadi titik berat dalam menjaga tren transformasi digital tetap pada jalan yang terarah. Hal lainnya adalah melegitimasi faktor kepemimpinan yang saat ini menjadi titik tolak terhadap semua pemimpin di masa mendatang dengan proses seleksi kepemimpinan yang lebih pro teknologi, faktor kepemimpinan ini harus direduksi agar penguatan lembaga tidak tergantung pada keabilitas personal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L.R., 2017. *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 8, No. 2, December 2017, hal. 87–102
- Ansell Christ and Gash Alison, 2008, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public*

- Administration Research and Theory: J-PART*, Vol. 18, No. pp. 543-571
- Badan Keahlian DPR RI. 2021. Politik dan Keamanan Budget Issue Brief Vol 01, Ed 1, February 2021.
- Becker, J., Niehaves, B., Bergener, P., Räckers, M. 2008. Digital Divide in eGovernment: The eInclusion Gap Model. In: M.A. Wimmer, H.J. Scholl, and E. Ferro (Eds.): EGOV 2008, LNCS 5184, pp. 231–242. Springer-Verlag, Heidelberg.
- Chen, H. 2002. Digital Government: Technologies and Practices. *Decision Support Systems*, 34, 223-227.
- Denhardt, R.B.; Denhardt, J.V., 2007; The New Public Service: Serving, Not Steering; Armonk, New York/London, England; M.E. Sharpe
- Dennis Anderson, Robert Wu, June-Suh Cho, Katja Schroeder. 2015. *E-Government Strategy, ICT and Innovation for Citizen Engagement*. Springer: New York Pg. 14-15
- Emerson K. and Nabatchi T. 2015. Collaborative Governance Regimes. Washington DC: Georgetown University Press.
- Emerson K., Nabatchi T. and Balogh S. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory* 22(1): 1–29.
- European Commission. 2019. “The Digital Economy and Society Index (DESI)”
- Ferro, E., Gil-Garcia, J.R., Helbig, N. 2007. The Digital Divide Metaphor: Understanding Paths to IT Literacy. In: Wimmer, M.A., Scholl, J., Grönlund, Å. (eds.) EGOV. LNCS, vol. 4656, pp. 265–280. Springer-Verlag, Heidelberg
- Gray B. 2004. Strong Opposition: Frame-based Resistance to Collaboration. *Journal of Community & Applied Social Psychology*. 14: 166–176.
- Grönlund, A., Andersson, A., dan Hedström, K. 2005. *NextStep E-Government in Developing Countries*. Sweden: Örebro University
- Heeks, R. 2003. *Most eGovernment-for-Development Project Fail: How Can Risks be Reduced?* (No. 14). Manchester: Institute for Development Policy and Management
- Helsper, Ellen. 2008. *Digital inclusion: an analysis of social disadvantage and the information society*. Department for Communities and Local Government, London, UK. ISBN 9781409806141.
- Innes dan Booher, 2003, Collaborative policymaking: Governance through dialogue. In *Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society*, ed. M.A. Hajer and H. Wagenaar, 33–59. Cambridge: Cambridge Univ. Press
- Katadata., 2019. Indeks Inovasi indonesia Peringkat Kedua Terbawah di ASEAN. Diakses pada 29 July 2020
- Katadata., 2020. Pandemi Covid-19 Pacu UMKM Gunakan Media Digital. Diakses pada 29 July 2020
- Keeping America Informed. 2012. The U.S. Government Printing Office, Washington DC
- Kumar, R., dan Best, M. L. 2006. Impact and Sustainability of E-Government Services in Developing Countries: Lessons Learned from Tamil Nadu,

- India. *The Information Society*, 22(1), 1-12.
- Lathrop, Daniel dan Ruma, Laurel. 2010. *Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice*, California: O'Reilly Media.
- Maulana, R.Y. 2020. Collaborative governance in the implementation of e-government-based public services inclusion in Jambi Province, Indonesia. *Journal of Governance*, 5(1), 91-104. <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317>
- Mayer, R.C., Davis, J. H., & Schoor, D.F. 1995. An Integrative Model of Organizational Trust. *The Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3, 709-734.
- Meijer, A.J., Curtin, D. and Hillebrandt, M. 2012, "Open government: connecting vision and voice", *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 78 No. 1, pp. 10-29.
- Niehaves, B., Gorbacheva, E., Plattfaut, R. 2013. The Digital Divide vs. the e-Government Divide: Do Socio-Demographic Variables (Still) Impact E-Government Use among Onliners? In: Gil-Garcia, J. Ramon (eds): *e-Government Success Factors and Measures: Theories, Concepts, and Methodologies*, pp. 52-65. IGI Global
- Nurdin. 2012. Benchmarking Indonesian Local e-Government. *PACIS Conference in Ho Chi Minh Vietnam*, paper 61
- OECD. 2016. *Kajian Open Government Indonesia: Hal-Hal Pokok*
- O'Leary Rosemary, David M Van Slyke ed Sohne Kim, 2010, *The Future of Public Administration around the world*, Washington DC; Georgetown University Press.
- Osborne, S. (ed.), 2010. *The New Public Governance*; London & New York: Routledge
- Ostrom E. 2007. Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework. In Sabatier P. A. (ed.), *Theories of the Policy Process*. Boulder, CO: Westview Press, 21-64.
- Oyekunle, R., Akanbi-Ademolake, H.B. 2016. *An Overview of e-Government Technological Divide in Developing Countries*.
- Papadopoulou, P., Nikolaidou, M., & Martakos, D. 2010. What Is Trust in E-Government? A Proposed Typology. *Proceedings of the 43<sup>rd</sup> Hawaii International Conference on System Science*. Hawaii: IEEE Computer Society.
- R.S. Morse and Stephens, John B. 2012. Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning, *Journal of Public Affairs Education*.
- Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., Camerer, C. 1998. Not so different after all: A cross-discipline view of trust. *Academy of Management Review*, 23, 393-404.
- Sahraoui, S. 2007. e-Inclusion as a Further Stage of e-Government? *Transforming Government People Process and Policy* 1(1), pp. 44-58
- Scholl, H.J. (2010) *e-Government: Information, Technology and Transformation*. In: H.J. Scholl (ed.)

- Electronic Government: A Study Domain Past its Infancy, pp. 11-32. Armonk, NY: M.E. Sharpe
- Schwester, R., 2009. "Examining the Barrier to e-government Adoption", *Electronic Journal of e-Government*, Vol. 7 Issue 1 2009 (113-122)
- Seifert, J.W., dan Bonham, G. M. 2003. The Transformative Potential of E-Government in Transitional Democracies. *Proceedings of The International Conference on Public Administration in the 21st Century: Concepts, Methods, Technologies*, School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University.
- Setkab., 2020. Antisipasi Perubahan, Presiden Berikan 5 Arah-an Soal Perencanaan Transformasi Digital. Diakses pada 29 July 2020
- Singh, S., Castelnovo, W.: e-Government: A Time for Critical Reflection and More? In: Singh, S., Castelnovo, W. (eds.). 2015. *Leading issues in e-Government Research* vol. 2., pp. vii-xv. Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, United Kingdom
- Smith, M. (2010), Building institutional trust through e-government trustworthiness cues. *Information Technology and People*, 23(3), 222-246.
- Stoker, G. 2004. Designing institutions for governance in complex environments: Normative rational choice and cultural institutional theories explored and contrasted. *Economic and Social Research Council Fellowship*, Paper No. 1.
- Sutiyo, Sutiyo & Maharjan, Keshav. 2017. Decentralization and Rural Development in Indonesia. 10.1007/978-981-10-3208-0.
- United Nations. 2016. e-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development. Department of Economic and Social Affairs UN, New York
- Van de Ven, A. 1986. Central problems in the management of innovation. *Management Science*, 32, 590-607.
- Wahid, Fathul. 2004. Lesson from e-Government Initiatives in Indonesia. *Media Informatika*: Vol. 2, No. 2, December 2004, 13-21.
- World Bank. 2001. Issue Note: E-Government and the World Bank.
- Yin, R.K. 2009. *Case study research: Design and methods* (4<sup>th</sup> ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Yunita, N.P., Aprianto, R.D., 2018. Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia: Analisis Website. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018) ISSN: 2089-9815 Yogyakarta, 23-24 March 2018.

#### PROFIL SINGKAT

Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol. menyelesaikan S1 pada Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran 20214, kemudian melanjutkan studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan di kampus yang sama selesai pada tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2018 menjadi Dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi sampai sekarang. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Ljubljana, Slovenia.